

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Konflik di Suriah yang berawal pada tanggal 26 Januari 2011 ketika masyarakat sipil Suriah melaksanakan aksi demonstrasi dalam skala nasional.¹ Demonstran meminta Presiden Bashar al-Assad untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Bashar al-Assad merupakan anak dari Hafez al-Assad yang menjabat sebagai Presiden Suriah periode sebelumnya, kedua orang ini sama-sama diusung oleh Partai Ba'ath.² Partai Ba'ath sendiri sudah berkuasa selama lebih kurang lima dekade (1971-2011) di Suriah. Demonstran berharap dengan mundurnya Bashar al-Assad dapat mengakhiri rezim pemerintahan yang telah dibangunnya serta ingin menyudahi masa kekuasaan Partai Ba'ath, dikarenakan partai ini dianggap tidak mampu lagi memperbaiki kesejahteraan nasional Suriah, dari rakyat hingga stabilitas negara.

Puncak demonstrasi yang bertujuan damai tersebut terjadi pada 15 Maret 2011 di kota Deera. Menanggapi aksi tersebut Pemerintah Suriah yang berkuasa menggunakan cara kekerasan, yaitu dengan kekuatan militer yang dikerahkan untuk menghadapi demonstrasi rakyat Suriah tersebut.³ Penembakan oleh militer

¹ Bimbie, “*Sejarah Perang Suriah*”, diakses melalui <http://www.bimbie.com/sejarah-perang-suriah.htm>, (pada tanggal 22 November 2016).

² Ba'ath merupakan gabungan dari beberapa partai politik yang berfungsi sebagai partai pan-Arab (gerakan untuk penyatuan bangsa dan negara di dunia Arab dari Samudera Atlantik sampai Samudera Arab) dengan cabang beberapa negara Arab, partai memiliki dua cabang besar yang berada di Suriah dan Irak.

³ Sejarah Perang Suriah, diakses di <http://www.bimbie.com/sejarah-perang-suriah.htm>, (pada tanggal 28 November 2016).

pun diperintahkan dan menelan sedikitnya 23 jiwa baik dari pihak demonstran maupun pemerintah.⁴

Konflik di Suriah menjadi sorotan internasional dan dibahas dalam rapat besar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman mengusulkan resolusi DK PBB mendukung adanya intervensi militer terhadap Pemerintah Suriah.⁵ Resolusi DK PBB ini diveto oleh Rusia yang menolak hasil resolusi tersebut, karena dinilai resolusi tersebut akan membuka peluang terhadap pelanggaran kedaulatan Suriah.⁶ Selain itu, penolakan juga mendapat dukungan dari negara lainnya yang tergabung dalam BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa).⁷

Tekanan yang diberikan negara Barat terhadap Suriah terus ditentang oleh Rusia sebagai bentuk dukungannya terhadap Suriah. Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mendukung adanya intervensi berdasarkan pada aspek normatif perlindungan terhadap nilai kemanusiaan.⁸ Melalui penanaman nilai bersama serta ide-ide, Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi nilai bersama masyarakat dunia. HAM sebagai produk buatan Barat selalu dijadikan alasan untuk memulai intervensi dan memperluas hegemoninya.⁹ Rusia yang melihat tindakan Barat tersebut memilih untuk mendukung pemerintahan Suriah serta memveto setiap

⁴ BBC Indonesia, "Demonstrasi Suriah telan korban jiwa", diakses di www.bbc.com/indonesia/multimedia/2011/04/110408_syrianprotests.html, (pada 24 April 2017).

⁵ Sabrina Nurastuti Sudirman Putri dan Yessi Olivia, "Kebijakan Rusia Mengeluarkan Hak Veto Terhadap Rancangan Dewan Keamanan PBB tentang Konflik Sipil Di Suriah", 2013, halaman 8.

⁶*Ibid.*,

⁷ BRICS adalah akronim dari perkumpulan 5 negara dalam kerjasama ekonomi yaitu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

⁸ Masni Handayani Kinsal, "Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional", *Lex et Societas*, Vol.II, No.3, 2014, halaman 106.

⁹*Ibid.*,

resolusi DK PBB yang berisikan keinginan negara Barat untuk mengintervensi Suriah.

Rusia sebagai salah satu negara kuat yang terlibat dalam konflik Suriah pada dasarnya memiliki berbagai kepentingan nasional serta sejarah yang panjang dengan Suriah. Pertama adalah segi geografis Suriah memiliki peranan penting bagi Rusia untuk mencapai kepentingan nasionalnya.¹⁰ Suriah yang secara geografis berada di jantung Timur Tengah, berbatasan dengan Israel, Yordania, Irak, Libanon, dan Turki. Disebelah barat Suriah berbatasan dengan perairan Mediterania, yang merupakan perairan yang vital bagi dunia. Letak geografis Suriah yang strategis ini memberikan keuntungan yang besar bagi Rusia melalui kerja sama dengan Suriah. Bentuk kerja sama tersebut adalah didirikannya pangkalan laut Rusia di wilayah Tartus sebelah barat Suriah yang terhubung dengan Laut Mediterania pada tahun 1971.¹¹ Rusia akan mempatenkan dan memperkuat pangkalan lautnya di Tartus, pangkalan laut Rusia di Tartus ini dapat mempermudah akses Rusia untuk mempertahankan Suriah dari intervensi asing.¹²

Kedua adalah segi ekonomi, setelah sebelumnya terjadi intervensi dan pergantian rezim di Libya telah membuat Rusia rugi sebanyak USD empat juta melalui perdagangan senjata. Kontrak perdagangan senjata Rusia dengan Libya terhenti seiring dengan jatuhnya rezim Muammar Khadafi.¹³ Berdasarkan

¹⁰ Lalu M. Akhdiat Kurniawan, Pra Adi Soelistijono, dan Adhiningasih Prabhawati, Dukungan Rusia Terhadap Rezim Bashar al-Assad Dalam Konflik Internal Suriah (e-journal Hubungan Internasional Universitas Jember), 2013, halaman 7.

¹¹ RBTH Indonesia, "Rusia Akan Bangun Pangkalan AL Permanen di Pelabuhan Tartus Suriah", diakses di http://indonesia.rbth.com/news/2016/10/10/rusia-akan-bangun-pangkalan-al-permanen-di-pelabuhan-tartus-suriah_637539, (pada tanggal 2 Januari 2017).

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*, Lalu M. Akhdiat Kurniawan, Pra Adi Soelistijono, dan Adhiningasih Prabhawati, halaman 8.

kejadian tersebut, Rusia tentu saja tidak ingin hal yang sama terulang kembali di Suriah. Rusia telah melakukan penjualan senjata dengan Suriah yang tercatat lebih dari USD satu miliar beberapa tahun terakhir.¹⁴ Akhir tahun 2011 saja pada saat terjadinya eskalasi konflik, Rusia telah menandatangani kesepakatan senilai USD 550 juta terkait pengiriman beberapa jenis senjata dengan Suriah.¹⁵ Tercatat sebanyak 72 persen persenjataan rezim Presiden Bashar al-Assad adalah hasil kerja sama dengan Rusia.¹⁶ Apabila pemerintahan Assad berhasil jatuh, Rusia akan mengalami kerugian, karena transaksi perdagangan senjatanya terhentikan. Hal ini menjadi motivasi bagi Rusia untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Pemerintah Assad.

Ketiga adalah segi politik, pada masa Perang Dingin peta keseimbangan politik di Timur Tengah memiliki peta keseimbangan yang jelas, antara rezim pro-Barat serta rezim yang pro-Rusia (pada saat itu Uni Soviet). Rezim pro-Barat cenderung konservatif seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sedangkan rezim pro-Rusia cenderung progresif seperti Suriah, Yaman, Libya, dan Mesir.¹⁷ Setelah runtuhnya Uni Soviet, peta tersebut perlahan memudar hingga belakangan ini keseimbangan tersebut benar-benar kacau. Pemudaran tersebut dikarenakan negara yang pro-Rusia seperti Libya, Yaman, dan Mesir mengalami transformasi yang signifikan. Transformasi yang terjadi cenderung membawa negara-negara tersebut mendekati ke Amerika Serikat dengan demokratisasinya. Hal ini membuat

¹⁴*Ibid.*, halaman 9.

¹⁵ Kompas News, “72 Persen Senjata Suriah Diimpor dari Rusia”, diakses di <http://internasional.kompas.com/read/2012/03/19/12043477/72.Persen.Senjata.Suriah.Diimpor.dari.Rusia>, (pada tanggal 26 Februari 2017).

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷*Ibid.*, Lalu M. Akhdiat Kurniawan, Pra Adi Soelistijono, dan Adhiningasih Prabhawati, halaman 9.

Rusia sebagai penerus Uni Soviet khawatir akan kehilangan pengaruhnya di Timur Tengah, sehingga hegemoni Amerika Serikat akan semakin melebar.¹⁸

Transformasi tersebut menyisakan Suriah sebagai satu satunya negara yang pro-Rusia, hal inilah yang membuat Suriah menjadi negara vital untuk pelaksanaan politik luar negeri serta eksistensi Rusia di Timur Tengah. Diharapkan Suriah dapat mempengaruhi negara-negara yang mengalami transformasi atau setidaknya mengawal negara-negara tersebut sehingga tidak sepenuhnya jatuh dan mempercayakan negaranya kepada Amerika Serikat.¹⁹ Suriah juga telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Rusia sehingga kekuatan Rusia dapat terlihat kembali di Timur Tengah. Suriah juga merupakan benteng terakhir di Timur Tengah dalam peta geopolitik anti-Amerika bersama Iran dan Hizbullah.²⁰ Suriah, Iran, dan Hizbullah memiliki kesamaan yaitu memiliki sikap politik anti-Amerika sekaligus anti-Israel, hal ini selalu memberikan kesulitan masuknya agenda Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah.²¹ Benteng ini penting bagi Rusia dalam menghalangi kekuatan serta dominasi dari Amerika Serikat dan sahabatnya Israel untuk menguasai Timur Tengah. Hal ini menjadi titik balik Rusia untuk berperan lebih aktif dalam membantu aliansinya tersebut. Jika Presiden Bashar al-Assad jatuh maka Suriah akan ditinggal berantakan seperti negara pendahulu Libya, Tunisia dan Mesir.

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹*Ibid.*, Lalu M. Akhdiat Kurniawan, Pra Adi Soelistijono, dan Adhiningasih Prabhawati, halaman 11.

²⁰ Republika.co.id, “Dubes RI untuk Suriah Angkat Bicara Soal Assad dan Suriah”, diakses di <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/12/17/o4cg87320-dubes-ri-untuk-suriah-angkat-bicara-soal-assad-dan-suriah-part2>, (pada tanggal 2 Januari 2017).

²⁰*Ibid.*, Lalu M. Akhdiat Kurniawan, Pra Adi Soelistijono, dan Adhiningasih Prabhawati, halaman 13.

²¹*Ibid.*,

Keempat adalah segi keamanan. Secara geografis Timur Tengah berdekatan dengan wilayah selatan Rusia yaitu Kaukasus, dekatnya wilayah tersebut ditakutkan akan memberikan dampak buruk terhadap Kaukasus. Wilayah Kaukasus dihuni oleh mayoritas Muslim Chechnya, wilayah ini sering mengalami pergolakan dengan pemerintahan Rusia karena disana terdapat beberapa kelompok separatis.²² Dengan adanya gejolak di Timur Tengah dikhawatirkan kelompok separatis tersebut akan ikut memulai aksinya di wilayah Kaukasus. Muslim Chechnya juga telah diidentifikasi ikut serta dan tergabung dalam kelompok ekstremis dalam pergolakan di Timur Tengah, hal ini menambah fokus Rusia terhadap keamanan negaranya sendiri. Para ekstremis itu dapat saja kembali ke Rusia dengan bekal pengalaman bertempur dan memulai konflik internal di Rusia. Hal tersebut dapat mengganggu keamanan warga negara Rusia nantinya, sehingga ini pun ini menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Rusia.

Adanya kelompok Islam ekstremis yang ikut berperan di dalam konflik Suriah yang bernama *Islamic State of Iraq and ash-Sham* (ISIS) menambah kekhawatiran Rusia. Apabila ISIS semakin kuat maka ada indikasi akan membakar semangat separatis Muslim Chechnya dan Rusia menjadi target kelompok ekstremis ini suatu waktu nanti. Hal ini mendorong Rusia untuk memberikan dukungan penuh terhadap Presiden Bashar al-Assad dalam mempertahankan negaranya serta melawan kelompok ekstremis tersebut.

Veto dari Rusia akan terus berlanjut selama resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut menyudutkan Pemerintah Suriah dan tidak mengutamakan

²²*Ibid.*, Lalu M. Akhdia Kurniawan, Pra Adi Soelistijono, dan Adhiningasih Prabhawati, halaman 13.

penyelesaian konflik secara damai. Veto Rusia menyebabkan konflik Suriah mempengaruhi stabilitas politik internasional. Hal ini disebabkan oleh aktor yang bermain terbagi untuk memilih berpihak kepada kubu yang mana, apakah kubu pemberontak atau Pemerintah Suriah. Ketegangan antar negara-negara yang ingin menjadi aktor dalam konflik inipun tidak dapat dihindarkan.

Veto Rusia tidak dapat selalu melindungi Suriah dikarenakan eskalasi konflik di Suriah semakin memanas. Sehingga pada 21 April 2012 Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi dengan mengirimkan pasukan perdamaian bernama *United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)*.²³ UNDOF bertugas di Suriah untuk membantu pihak oposisi melawan pemerintah Assad. Rusia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan resolusi Dewan Keamanan tersebut juga mendapat keuntungan, sehingga Rusia dapat masuk ke Suriah dan lebih mudah memberikan dukungannya terhadap pemerintah Assad.²⁴

Dengan apa yang telah terjadi sebelumnya di Suriah, Presiden Assad dikecam dunia karena dianggap telah melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat di Suriah.²⁵ Dalam sidang DK PBB sebelumnya pada 4 Oktober 2011, Rusia ‘menyelamatkan’ Suriah dengan menggunakan hak vetonya.²⁶ Rusia juga terlihat berperan aktif dalam memperjuangkan Suriah di rapat besar DK PBB berikutnya pada 4 Februari 2012 dan 19 Juli 2012.

²³ Ibrahim Noor, “Analisis Intervensi Rusia Dalam Konflik Suriah”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional vol 2 no 4, 2014, halaman 1064.

²⁴ *Ibid.*, Ibrahim Noor, “Analisis Intervensi Rusia Dalam Konflik Suriah”.

²⁵ *Ibid.*, Lalu M. Akhdiat Kurniawan, Pra Adi Soelistijono, dan Adhiningasih Prabhawati, halaman 2.

²⁶ Sabrina Nurastuti Sudirman Putri, Yessi Olivia, “Kebijakan Rusia Mengeluarkan Hak Veto Terhadap Rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB Tentang Konflik Sipil Di Suriah”, Universitas Riau, 2013, halaman 6.

Peneliti menyimpulkan dengan tindakannya tersebut Rusia tidak akan membiarkan Barat memutuskan nasib kawasan Timur Tengah tanpa keterlibatan Rusia didalamnya. Hal ini tergambar dari langkah langkah yang ditempuh Rusia terkait konflik Suriah baik itu langkah-langkah politik maupun keamanan. Rusia mendukung proses reformasi dilakukan oleh Suriah. Secara resmi Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan seluruh upaya harus dikerahkan demi tercapainya dialog antara pihak-pihak yang terkait konflik Suriah. Putin menegaskan bahwa solusi politik damai adalah tujuan utama menyelesaikan konflik di Suriah ini.²⁷

*We are not protecting the Syrian government but international law. We need to use the United Nations Security Council and believe that preserving law and order in today's complex and turbulent world is one of the few ways to keep international relations from sliding into chaos. The law is still the law, and we must follow it whether we like it or not. Under current international law, force is permitted only in self-defence or by the decision of the Security Council. Anything else is unacceptable under the United Nations Charter and would constitute an act of aggression.*²⁸

Putin mengatakan jika negara-negara harus mematuhi hukum yang telah disepakati dalam dalam pakta PBB untuk tidak mengintervensi konflik internal yang terjadi di suatu negara. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin setelah adanya indikasi penggunaan senjata kimia terkait konflik Suriah. Alasan Putin dibalik pernyataannya tersebut jika cara damai ini berhasil maka akan meningkatkan kemungkinan untuk penyelesaian krisis lain di dunia dengan cara damai tanpa menimbulkan peperangan yang berkepanjangan.²⁹ Pada tahun 2014 upaya damai yang ditempuh oleh Rusia untuk mencapai resolusi konflik di Suriah menjadi semakin rumit dengan masuknya ISIS dalam konflik tersebut. Rusia melihat kehadiran ISIS akan memperpanjang proses pencapaian resolusi konflik secara damai di Suriah. Hingga pada tahun 2015 Rusia

²⁷ United Nation,2012. "Syria: Ban voice deep regret after Security Council fails to agree on resolution", diakses di <http://www.un.org/apps/news/story.asp/>, (pada tanggal 3 Januari 2017).

²⁸ Simon Adams, "Failure to Protect : Syria and the UN Security Council", 2015, halaman 17.

²⁹ *Ibid.*, Failure to Protect : Syria ans the UN Security Council, halaman 17.

memutuskan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok ekstrimis tersebut meskipun Rusia mendapat kecaman dari *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan internasional.³⁰ Dikarenakan serangan tersebut akan berakibat jatuhnya korban jiwa terhadap warga sipil. Akan tetapi tipisnya kemungkinan adanya perundingan dengan ISIS menyebabkan Rusia hanya memiliki pilihan untuk menggempur basis militer ISIS. Guna melemahkan dan memberi jalan militer Assad merebut kembali daerah-daerah tersebut.³¹ Tidak seperti organisasi internasional, Rusia yang memiliki kedekatan dengan Suriah sudah sejak lama serta memiliki kepentingan nasional di Suriah. Rusia bertindak sebagai pihak ketiga yang mencoba untuk menyelesaikan konflik di Suriah secara damai. Tindakan Rusia yang mencoba menyelesaikan konflik ini secara damai mendapatkan sambutan dan kerja sama yang baik juga dari Pemerintah Suriah.

Terbukti pada 9 September 2016 dalam pertemuan yang digagas oleh kedua belah pihak Amerika Serikat dan Rusia di Jenewa membuahkan hasil tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Suriah. Rusia, Amerika Serikat, Pemerintah Suriah, dan kelompok oposisi sepakat untuk melakukan gencatan senjata serta bekerja sama untuk memerangi kelompok ekstrimis ISIS.³² Pada 29 Desember 2016 kesepakatan gencatan senjata kembali dicapai yang dimediasi

³⁰ Dw.com, “Inilah Aktor Utama Perang Suriah”, diakses di <http://www.dw.com/id/inilah-aktor-utama-perang-suriah/g-18884183>, (pada 7 Februari 2017).

³¹ Dw.com, “Beruang Merah Mengebrak Suriah”, diakses di <http://www.dw.com/id/beruang-merah-mengebrak-di-suriah/g-18752747>, (pada 7 Februari 2017).

³² Kompas.com, “AS-Rusia Sepakati Gencatan Senjata untuk Bangun Perdamaian di Suriah”, diakses di <http://internasional.kompas.com/read/2016/09/10/07135571/as-rusia.sepakati.gencatan.senjata.untuk.bangun.perdamaian.di.suriah>, (pada tanggal 7 Februari 2017).

oleh Rusia dan Turki.³³ Militer Suriah dan kelompok oposisi menyetujui hasil dari kesepakatan tersebut dan menghentikan seluruh operasi militer. Rusia akan menjamin tidak adanya penyerangan dari kubu Presiden Assad dan Turki menjamin dari pihak oposisi. Jika gencatan senjata ini berhasil, maka akan dilanjutkan dengan negosiasi politik yang hanya dimediasi oleh Rusia dan Turki antara Presiden Assad dengan pihak oposisi di Astana, Kazakistan. Melalui gencatan senjata ini, Rusia mengharapkan jika kesepakatan yang telah dicapai ini akan ditindaklanjuti oleh PBB. Dengan cara mengadakan pertemuan untuk menempuh jalan perdamaian yang melibatkan banyak pihak.³⁴

Hal ini menjadi penting dikarenakan manajemen konflik dan cara damai yang digagas oleh Rusia dapat saja menjadi pemecahan dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di dunia. Dapat dilihat intervensi kekuatan militer bukan jawaban lagi untuk penyelesaian suatu konflik karena hal tersebut hanya akan menjadikan konflik semakin rumit. Tindakan Rusia disini menjadi menarik untuk dilihat dikarenakan Rusia yang merupakan negara kuat dalam segi militer lebih memilih jalan damai dalam penyelesaian konflik internal rakyat Suriah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik di Suriah telah mempengaruhi stabilitas politik internasional. Negara-negara yang memiliki kepentingan melakukan intervensi di Suriah, khususnya negara-negara besar yang menjadi anggota di PBB. Rusia sebagai salah satu negara besar dan juga anggota PBB memilih untuk memihak

³³ Andika Herman Mustakim, "Gencatan Senjata di Suriah Disepakati", Diakses di <https://international.sindonews.com/read/1166970/43/gencatan-senjata-di-suriah-disepakati-1483077158>, (pada 7 Februari 2017).

³⁴*Ibid.*, Andika Herman Mustakim, pada 7 Februari 2017.

pemerintahan Assad. Rusia juga telah menawarkan solusi damai terkait konflik tersebut akan tetapi tidak dibahas lebih lanjut dalam rapat besar PBB. Sehingga Rusia memutuskan akan memveto setiap resolusi apabila hanya menitik beratkan kesalahan pada pemerintahan Assad.

Tindakan Rusia ini tentu saja memiliki dasar yang jelas, dikarenakan cara Barat yang mengedepankan intervensi telah terbukti tidak efektif lagi untuk penyelesaian konflik. Rusia terus dengan gencar menyerukan penyelesaian dengan cara damai meskipun hal tersebut tidak mendapat dukungan dari PBB, peneliti melihat peran Rusia menyelesaikan konflik secara damai. Dimulai dari awal pergolakan hingga tercapainya kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana peran Rusia sebagai pihak ketiga dalam manajemen konflik secara damai di Suriah?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan Rusia sebagai pihak ketiga dalam manajemen konflik yang terjadi di Suriah melalui jalan damai.

1.5 Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan diantaranya :

1. Secara akademis penelitian ini membantu peneliti memahami teori penyelesaian konflik negara lain melalui jalan damai dalam tatanan sistem

internasional. Untuk keilmuan Hubungan Internasional penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami tindakan yang diambil pihak ketiga dalam manajemen konflik yang terjadi.

2. Secara praktik penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca supaya dapat lebih mengerti dan memahami peta konsep konflik dan manajemen konflik yang terjadi di Suriah.

1.6 Studi Pustaka

Dalam membantu pengembangan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah sebagai bahan rujukan. Rujukan pertama adalah tulisan dari Ibrahim Noor yang berjudul “Analisis Intervensi Rusia Dalam Konflik Suriah”.³⁵ Dalam penelitian ini Noor membahas analisis tentang bentuk intervensi yang dilakukan Rusia terhadap konflik Suriah. Noor berpendapat bahwa dengan adanya keputusan DK PBB mengintervensi konflik Suriah. Hal ini sekaligus memuluskan jalan bagi Rusia untuk mendukung pemerintahan Suriah secara langsung. Rusia yang bertindak memihak kubu Pemerintah Assad juga memiliki kepentingan negaranya di Suriah serta telah lama memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Suriah. Dukungan yang diberikan Rusia berupa bantuan militer serta diplomatik.

Dalam penelitiannya untuk memahami tindakan Rusia, Noor mengusung konsep Intervensi dan Kepentingan Nasional. Rusia dinilai mendukung Suriah dikarenakan adanya kepentingan ekonomi serta keinginan untuk menjaga hubungan bilateral Rusia dengan Suriah yang telah lama dibangun. Dukungan

³⁵ Ibrahim Noor, “Analisis Intervensi Rusia Dalam Konflik Suriah” e-Journal Unmul Vol 2, No.4, 2014, halaman 1063-1078.

militer Rusia di Pangkalan Tartus juga menjadi indikasi perlawanan terhadap segala bentuk intervensi negara barat di Suriah.

Rujukan kedua adalah tulisan karya Lalu M. Akhdiat Kurniawan, Pra Adi Soelistijono dan Adhiningasih Prabhawati yang berjudul “Dukungan Rusia Terhadap Rezim Bashar Al-Assad Dalam Konflik Internal Suriah”.³⁶ Dalam penelitiannya ini Kurniawan dan tim memberikan paparan bagaimana tindakan Rusia mendukung Suriah dalam tatanan sistem internasional. Dukungan ini berupa hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisikan tujuan untuk mengintervensi konflik internal yang terjadi di Suriah. Hingga pada bagaimana Rusia mendukung Suriah dengan jalan militerisasi untuk mencegah adanya upaya intervensi barat dalam konflik ini.

Dalam penelitiannya ini Kurniawan dan tim memakai konsep Kepentingan Nasional dan Geopolitik Geostrategi. Dimulai dari kepentingan Rusia di Suriah terkait ekonomi, pertahanan, tata internasional, serta ideologi. Konsep geopolitik serta geostrategi dinilai perlu untuk melihat tindakan Rusia di Suriah oleh Akhdiat dan tim. Hal ini menjadi menarik karena konsep ini memiliki keterkaitan dengan tindakan Rusia di Suriah, melihat geopolitik diperlukan suatu negara dalam menetapkan kebijakan strategis dalam suatu isu. Kurniawan dan timsampai pada kesimpulan dengan kepentingan Rusia di Suriah membuat Rusia memilih jadi dukungan untuk rezim Bashar al-Assad meskipun tindakannya tersebut dikecam oleh internasional.

³⁶ Lalu M. Akhdiat Kurniawan, Pra Adi Soelistijono, Adhiningasih Prabhawati, “Dukungan Rusia Terhadap Rezim Bashar al-Assad Dalam Konflik Internal Suriah”, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember, 2013.

Ketiga jurnal dari Simon Adams yang berjudul “*Failure to Protect : Syria and the UN Security Council*”.³⁷ Adams adalah eksekutif direktur dari *Global Centre for the Responsibility to Protect*, Adams telah bekerjasama dengan pemerintah serta *Non Governmental Organization* (NGO) untuk mendapatkan hasil penelitiannya terkait konflik yang terjadi di Suriah. Sehingga Adams telah mendapatkan fakta bahwa DK PBB telah gagal dalam melindungi Suriah dari konflik yang berkepanjangan.

Adams melihat segala aspek yang terjadi di Suriah, dimulai dari bagaimana asal mula konflik, Resolusi Dewan Keamanan PBB, intervensi Barat, tindakan Rusia, hingga indikasi pemakaian senjata kimia. Adams sampai pada kesimpulan bahwa konflik yang terjadi Suriah adalah sebagai bentuk kegagalan dari Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan pada komitmen UN pada tahun 2005 yang bertujuan untuk menghindari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta pembersihan etnis. Seharusnya Dewan Keamanan PBB dapat menyelesaikan permasalahan di Suriah secara damai terlepas itu adanya hak veto atau tidak. Dewan Keamanan PBB dinilai tidak berfokus akan penyelesaian konflik secara damai, penuh dengan keinginan intervensi serta kepentingan negara yang didahulukan.

Keempat rujukan untuk membantu penelitian ini penulis memakai jurnal yang ditulis oleh Masni Handayani Kinsal yang berjudul “Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional”.³⁸ Kinsal mengatakan jika PBB

³⁷ Simon Adams, “*Failure to Protect : Syria and the UN Security Council*”, *Global Centre for the Responsibility to Protect, Occasional Paper Series, No. 5, 2015.*

³⁸ Masni Handayani Kinsal, “*Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional*”, *Lex et Societas, Vol.II, No.3, 2014.*

telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi di Suriah. Dimulai dari blokade, embargo, pengutusan tentara khusus PBB, bantuan kemanusiaan, serta dikeluarkannya resolusi mengenai pelucutan senjata kimia yang digunakan oleh rezim Bashar al-Assad. Masni sampai pada kesimpulan dimana badan internasional yang berwenang harus memberikan sanksi terhadap Suriah dikarenakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan HAM yang terjadi di Suriah.

Rujukan terakhir yaitu jurnal yang ditulis oleh Sabrina Nurastuti Sudirman Putri dan Yessi Olivia yang berjudul “Kebijakan Rusia Mengeluarkan Hak Veto Terhadap Rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB Tentang Konflik Sipil di Suriah”.³⁹ Dalam penelitiannya Putri dan Olivia berfokus pada tindakan Rusia yang memveto resolusi PBB terkait konflik yang terjadi di Suriah, dimana resolusi tersebut hanya menyudutkan otoritas Suriah. Negara Barat yang mengusulkan intervensi di Suriah terkesan lupa kalau Suriah juga adalah negara yang berdaulat dan hal tersebut harus dihormati oleh anggota PBB lainnya sebelum melakukan intervensi.

Putri dan Olivia juga melihat dari tindakan yang dilakukan oleh Rusia untuk mendukung Pemerintahan Assad, seperti yang telah dibahas sebelumnya berbagai kepentingan Rusia terkait Suriah merupakan pertimbangan terhadap tindakan Rusia. Setelah melihat berbagai aspek terkait veto Rusia serta kepentingannya di Suriah, Putri dan Olivia menarik kesimpulan veto dari Rusia

³⁹ Sabrina Nurastuti Sudirman Putri dan Yessi Olivia, “Kebijakan Rusia Mengeluarkan Hak Veto Terhadap Rancangan Dewan Keamanan PBB tentang Konflik Sipil Di Suriah”, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Riau, 2013.

adalah bukti dari Rusia menegaskan bahwa Rusia juga memiliki kepentingan, yaitu kepentingan politik serta keamanan terhadap Suriah.

Dari studi pustaka diatas telah dipaparkan tentang peranan Rusia di dalam konflik Suriah berdasarkan sudut pandang dari masing-masing peneliti. Penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap peranan Rusia di Suriah dimana penelitian sebelumnya umumnya menekankan kepada agresi militer dan cara kekerasan lainnya. Pada penelitian ini lebih ditekankan kepada upaya damai yang coba dicapai oleh Rusia, seperti hak veto Rusia di Dewan Keamanan PBB, upaya negosiasi, hingga mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis peran Rusia dalam upaya menyelesaikan konflik Suriah, peneliti akan menggunakan beberapa konsep untuk dijadikan alat analisa yang relevan.

1.7.1 Manajemen Konflik

Manajemen konflik merupakan suatu upaya mengakhiri pertempuran, membatasi penyebaran konflik dan dengan demikian dapat membawa kepada resolusi konflik.⁴⁰ Pada akhirnya manajemen konflik dapat membawa kepada usaha untuk kompromi dimana tingkat kekerasan dapat diminimalisir. Manajemen konflik sendiri memiliki turunan dan peneliti akan memakai turunan tersebut dalam membantu penelitian ini.

⁴⁰ Niklas L.P. Swanstrom dan Mikael S. Weissmann, "Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management and Beyond: a conceptual exploration", 2005, halaman 23.

1.7.1.1 Intervensi Pihak Ketiga (*Third Party Intervention*)

Intervensi oleh pihak ketiga dilakukan dengan konteks adanya negara yang berada dalam situasi konflik, crisis, dan perang. Tindakan yang dikategorikan sebagai *third party intervention* yaitu ketika konflik yang terjadi dikelola oleh pihak ketiga dengan cara-cara seperti intervensi militer, negosiasi bilateral, atau berperan sebagai arbitrase.⁴¹ Ronald J. Fisher, membuat klasifikasi bentuk-bentuk intervensi pihak ketiga sebagai bagian dari *pacific interventions* yaitu⁴² :

1. Konsiliasi/Pendamai (*Conciliation*)

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sedangkan didalam konteks intervensi pihak ketiga dalam konflik internasional, pihak ketiga yang dipercaya bertugas untuk menyediakan saluran komunikasi informal antara para pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, menurunkan ketegangan, dan mendorong interaksi langsung diantara kedua belah pihak, dan biasanya lebih ke arah negosiasi.

Jadi, konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya pada komisi baik permanen ataupun sementara. Tugas pihak yang menjadi konsiliasi adalah mempelajari sebab-sebab timbulnya sengketa dan mencoba untuk

⁴¹ Jean Sebastian Rioux, "*Third Party Intervention in International Conflicts : Theory and Evidence*", Canada Research Chair in International Security, Laval University, 2003, halaman 3.

⁴² Ronald J. Fisher, "*Methods of Third-Party Intervention*", Bergh Research Center for Constructive Conflict Management, 2001, halaman 165.

merumuskan penyelesaian secara tidak memihak sebagaimana yang diminta oleh para pihak yang berkonflik.

2. Konsultasi/Penasehat (*Consultation*)

Konsultasi merupakan bentuk pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam konteks ini pihak ketiga bekerja memberikan upaya penyelesaian konflik dari berbagai macam pandangan melalui komunikasi dan analisis. Menggunakan keterampilan dalam hubungan antar manusia dengan pemahaman ilmu sosial untuk memahami dinamika dan peta konsep konflik yang terjadi. Jadi, pihak ketiga yang menjadi dewan penasehat memberikan analisisnya. Kemudian memberikan saran penyelesaian konflik tersebut, oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman yang mendalam tentang peta konflik tersebut.

3. Mediasi Murni (*Pure Mediation*)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pada konteks ini yaitu mediasi murni, pihak ketiga berperan untuk memfasilitasi kesempatan negosiasi terhadap isu yang substantif. Menggunakan alasan, persuasi, efektifitas informasi yang telah di dapat, dan memberikan saran tentang alternatif untuk menyelesaikan konflik. Pihak ketiga diharapkan nantinya dapat mencapai kesepakatan untuk bernegosiasi antara kedua belah pihak yang berkonflik, untuk mencapai suatu kesepakatan seperti gencatan senjata, pelucutan senjata dan lainnya.

4. Mediasi Kekuatan (*Power Mediation*)

Sedikit berbeda dengan dengan mediasi murni dimana mediasi dengan menggunakan kekuatan atau paksaan memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menghasilkan perjanjian. Pihak ketiga juga dapat memberikan hukuman atau sanksi apabila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut. Kemudian pihak ketiga juga berperan sebagai pemantau dan penjamin terlaksananya perjanjian tersebut.

5. Arbitrase (*Arbitration*)

Arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa. Pada konteks ini pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat. Pihak ketiga mendengarkan tuntutan dan keluhan masing-masing pihak dan pada akhirnya memberikan keputusan yang mengikat keduanya. Keputusan ini dituntut untuk sangat adil dan seimbang dalam memenuhi keinginan kedua belah pihak.

Seringkali keputusan tersebut memihak kepada satu pihak akan tetapi langkah ini dapat saja menjadi alternatif untuk meredam agresi dan tindak kekerasan. Pihak ketiga dituntut untuk mengidentifikasi tujuan, menggali keterangan yang dibutuhkan, dan memberi informasi yang dirasa perlu sehingga keputusan yang diberikan tersebut dapat dipahami kedua belah pihak.

6. Penjaga Perdamaian (*Peacekeeping*)

Pada konteks ini pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak memiliki kewenangan untuk mengerahkan personel militernya dalam mengawasi gencatan senjata serta perjanjian antara pihak yang berkonflik.

Personel militer tersebut juga dapat menjalankan misi kemanusiaan di daerah konflik.

Dengan tujuan untuk mengembalikan situasi normal kepada masyarakat sipil, membantu kegiatan politik ataupun proses pemilihan. Perlu digaris bawahi peranan militer disini bukan untuk memihak satu pihak akan tetapi sebagai pihak netral yang menjaga situasi dan kondisi. Personel militer dari pihak ketiga ini memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya intervensi dari pihak luar yang mencoba mengganggu jalannya upaya penyelesaian konflik.

Garis besar dari peranan pihak ketiga yaitu memfasilitasi kesempatan untuk melakukan negosiasi antara pihak yang berkonflik secara damai. Pihak ketiga dapat menggunakan asas-asas hukum ataupun diluar hukum sesuai dengan situasi konflik yang terjadi, tujuannya agar pihak yang berkonflik dapat berkompromi untuk penyelesaian konflik tanpa adanya batasan. Demikian juga pihak ketiga harus menjaga kerahasiaan pihak yang berkonflik, maka dari itu diperlukan kebijaksanaan, keterampilan hubungan antar manusia, dan ilmu sosial dari pihak ketiga itu sendiri. Penyelesaian konflik secara damai merupakan tujuan utama dari pihak ketiga selaku mediator. Mediator harus mempunyai itikad baik

dan tidak memihak yang mana keberpihakan tersebut hanya akan memperpanjang konflik yang telah ada.

Setelah mencapai kesepakatan dalam negosiasi dalam bentuk gencatan senjata, pelucutan senjata atau apapun nantinya yang disepakati maka diperlukan peranan dari pihak ketiga berikutnya yaitu penjaga perdamaian. Pihak ketiga memiliki kewenangan untuk menempatkan personel militernya di daerah konflik seperti yang telah dijelaskan diatas. Personel militer ini bertugas untuk memastikan situasi tidak kembali memanas, mengawasi jalannya kesepakatan, serta memastikan tidak adanya intervensi dari pihak lain yang dapat memicu konflik kembali memanas. Dengan memakai konsep diatas membantu penulis untuk menjawab peran yang dilakukan oleh Rusia apakah memang bertujuan damai atau tidak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian hubungan internasional merupakan sebuah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan penulis sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan tentang sebuah fenomena dalam hubungan internasional.⁴³

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini berusaha membangun realitas dan memahami realitas

⁴³ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), halaman 2-3.

tersebut dengan memperhatikan proses peristiwa dan otensitas.⁴⁴ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan analisa yang tajam dengan didasari fakta-fakta dan dinamika yang telah dipublikasikan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. Jenis ini dipilih dengan tujuan agar penulis dapat menggambarkan dengan lebih jelas bagaimana tindakan yang diambil Rusia sebagai pihak ketiga terkait konflik yang terjadi di Suriah.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dengan tujuan mendapatkan penelitian yang fokus dan konsisten maka penulis menentukan batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini akan berfokus pada peranan yang dilakukan Rusia dalam upaya menyelesaikan konflik Suriah secara damai sejak tahun 2011 hingga 2016.

Penetapan batasan penelitian ini pada tahun 2011 berdasarkan pada tindakan hak veto pertama kali dari Rusia dalam resolusi DK PBB terkait konflik yang terjadi di Suriah. Penelitian ini akan berfokus kepada tindakan Rusia yang mendukung pemerintahan Assad disaat sebagian besar negara keanggotaan PBB memiliki resolusi yang dianggap melanggar kedaulatan Suriah oleh Rusia. Sedangkan pemilihan tahun 2016 dikarenakan pada pertengahan tahun tersebut gencatan senjata pertama dapat dicapai, hingga pada akhir tahun 2016 kesepakatan gencatan senjata kedua dapat dicapai kembali.

⁴⁴ Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif, *Journal Social Humaniora*, Vol.9, no.2, 2005, halaman 58.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau variable dependen merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, jelaskan dan ramalkan.⁴⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah negara Rusia. Sedangkan unit yang dampaknya terhadap unit analisis hendak diamati adalah unit eksplanasi atau disebut juga dengan variabel independen.⁴⁶ Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah kepentingan Rusia terkait konflik di Suriah. Tingkat analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian.⁴⁷ Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat sistem internasional. Hal ini ditentukan karena dalam penelitian ini penulis melihat perilaku Rusia dalam persepsi yang dimilikinya terhadap konflik yang tengah terjadi di Suriah.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data-data dari sumber yang berbentuk literatur akademik berupa data sekunder atau tulisan-tulisan. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁴⁸ Oleh karena itu, penulis mencari data dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan peran Rusia menyelesaikan konflik di Suriah secara damai.

⁴⁵*Ibid.*, Mohtar Mas' oed, halaman 39.

⁴⁶*Ibid.*,

⁴⁷*Ibid.*, halaman 36.

⁴⁸ M.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), halaman 27.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan cara yang dipakai untuk menemukan dan memberi arti pada serangkaian data dalam penelitian ini.⁴⁹ Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada tindakan yang dilakukan oleh Rusia menyelesaikan konflik yang ada di Suriah dengan bantuan konsep manajemen konflik dan turunannya. Data yang didapat kemudian dianalisis melalui konsep manajemen konflik dan *third party*. Dalam konsep ini terdapat enam indikator untuk menjabarkan peran yang dilakukan oleh Rusia dalam upayanya mengelola konflik Suriah. Indikator-indikator yang digunakan adalah konsiliator, pihak ketiga sebagai konsultan, mediator murni, *power mediator*, *Arbitrator*, dan *Peacekeeper*. Dari analisis tersebut kemudian diharapkan dapat mendeskripsikan peran yang dilakukan Rusia dalam pengelolaan konflik Suriah secara damai.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I, Pendahuluan.

Dalam bab ini, diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Dinamika Konflik Suriah, Eskalasi, Hingga Internasionalisasi Konflik

⁴⁹*Ibid.*, Mohtar Mas'ood, halaman 9.

Pada bab ini akan dijelaskan dinamika konflik yang terjadi di Suriah. Dimulai dari sejarah, penyebab konflik, menjadi perhatian dunia, PBB, hingga intervensi asing.

BAB III, Peran Rusia Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Suriah.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan Rusia dalam upaya manajemen konflik di Suriah dengan cara damai.

BAB IV, Analisis Peran Rusia Sebagai Pihak Ketiga.

Pada bab ini penulis akan menganalisis tindakan Rusia sebagai pihak ketiga demi mencapai penyelesaian konflik Suriah secara damai. Analisis ini akan dibangun dengan menggunakan konsep dan metode yang telah dikemukakan sebelumnya.

BAB V, Penutup.

Pada bab ini peneliti akan menyimpulkan dan menyatakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.

